

**Strategi Komite Nasional Indonesia Daerah Surakarta (KNIDS) dalam  
mengambil alih swapraja, 1945-1946**

Oleh

**Cahya Putri Musaparsih**

**NIM: C0500014**

**BAB III**

**PERAN KOMITE NASIONAL INDONESIA DAERAH  
SURAKARTA PADA MASA KEMERDEKAAN DI SURAKARTA**

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamlirkan di Jakarta membawa pengaruh mendalam di Surakarta. Pemuda dan politisi di Surakarta bangkit dan sadar dalam bernegara. Inilah yang selanjutnya akan menciptakan peristiwa-peristiwa yang dapat merubah sejarah Surakarta.

**A. Peran Bangsawan Keraton Pada Masa Kemerdekaan**

Pada bab terdahulu telah dijelaskan mengenai aktivitas politik bangsawan keraton pada masa-masa kolonial dan pendudukan Jepang. Hal tersebut memberi landasan untuk menganalisis bagaimana sikap dan perilaku politik para bangsawan dalam menjalankan kehidupan politiknya.

Mobilisasi para bangsawan pada masa pendudukan Jepang memberi keuntungan bagi para bangsawan keraton karena pada masa tersebut mereka dilibatkan dalam pemerintahan umum sehingga mereka dapat memahami situasi umum yang terjadi untuk menentukan langkah mereka. Mobilisasi politik yang

dilakukan oleh kelompok bangsawan sebenarnya telah dilakukan semenjak masa pendudukan Jepang. Walaupun pada masa pendudukan Jepang konflik di dalam keraton mengalami penurunan ketegangan, para bangsawan ternyata menemukan sumber-sumber politik yang pada masa kemerdekaan terbukti dapat digunakan. Di bawah ini akan diuraikan mengenai aktivitas kaum bangsawan dalam menjalankan fungsinya sebagai kelas penguasa di Surakarta.

### **1. Kegiatan Politik Kaum Bangsawan Kasunanan Pada Masa Pendudukan Jepang**

Politik ekspansi Jepang yang memanfaatkan sumber daya manusia dengan efisien menggunakan kaum bangsawan untuk memobilisasi dukungan seluruh rakyat dari popularitas para bangsawan. Beberapa nama bangsawan yang akan menentukan arah politik di Surakarta pada masa proklamasi akan diuraikan di bawah ini.

#### **a. Mr. BPH Sumodiningrat**

Pada saat-saat terakhir pemerintah Hindia Belanda, Sumodiningrat merupakan salah seorang tokoh dari Parindra yang memihak Jepang, selain itu ia menjadi tokoh utama Pokoso di bawah bimbingan Mr. Singgih dan Sutopo Wonoboyo.<sup>58</sup> Sebagai putra dari Kusumayuda, ia menyadari bahwa kedudukannya sebagai anak dari putra kesayangan Paku Buwono X yang dicalonkan untuk menjadi raja dapat mendudukannya sebagai putra mahkota dan menjadi calon raja di Surakarta.

---

<sup>58</sup> Larson, *op.cit.*, hal. 231.

Konflik keraton pada tahun 1939 dengan penggeseran dirinya yang bersekutu dengan kelompok anti Belanda menyebabkan ia tidak diberi kedudukan apapun di kerajaan yang berada di bawah kekuasaan pamannya. Oleh karena itu kegiatan Sumodiningrat pada masa pendudukan Jepang lebih dicurahkan kepada pemerintah pendudukan. Di dalam struktur sosial politik pemerintah pendudukan, Sumodiningrat menempati posisi kemiliteran yang menyebabkan dirinya lebih mudah mengenal jaringan kekuatan massa yang akan terbukti efektif pada masa kemerdekaan.

Sumodiningrat diberi kedudukan *Cudanco Dai-Ichi Daidan* yang bertempat di Manahan atau Komandan Batalyon II Manahan dalam kesatuan Peta. Di dalam kesatuan ini terdapat nama KPH Hamijoyo Saroso (bakal Mangkunegara VIII) yang kelak akan menjadi musuh politiknya. Akan tetapi dia berbeda dengan para bangsawan yang menempati jabatan tinggi kemiliteran yang lain. Apabila bangsawan lainnya menempati kedudukan tersebut hanya sebagai faktor penarik dukungan massa terhadap Peta dan tidak melakukan kegiatan aktif di dalamnya, Sumodiningrat justru membangun hubungan dengan kesatuan-kesatuan Peta lainnya terutama dengan Batalyon Peta Wonogiri di bawah Cudanco Mulyadi Joyomartono dan Batalyon Lawu di bawah pimpinan Sastrodiharjo. Selain itu Sumodiningrat mengikuti pula kursus komando

Peta di Bogor yang dibentuk oleh tentara Jepang khusus untuk komandan-komandan militer pribumi di Jawa.<sup>59</sup>

Sumodiningrat tidak hanya dikenal dan aktif di antara golongan militer di Surakarta. Dia juga membina hubungan baik dengan para pegawai pribumi yang pada umumnya bekas aktivis politik yang ditahan oleh Belanda. Salah seorang sekutu utamanya ialah Suyono bekas aktivis PKI 1926 yang pada masa tersebut bekerja sebagai pegawai jawatan radio di Surakarta.

Kemampuan Sumodiningrat dalam mengefektifkan kedudukannya dalam struktur administrasi masa pendudukan Jepang dibuktikan dalam hubungannya dengan para intelektual nasionalis di Indonesia terutama di Surakarta. Dia merupakan salah seorang pendukung gagasan Indonesia merdeka. Hal tersebut dapat dilihat dari hubungan politiknya dengan gerakan-gerakan nasionalis di Indonesia mulai dari Pekalongan, Cirebon hingga Jakarta. Gerakan nasionalis tersebut tidak hanya yang bersifat resmi, namun ia memiliki hubungan dengan gerakan bawah tanah di bawah kepemimpinan Syahrir yang memiliki jaringan di seluruh pulau Jawa terutama daerah pesisir.<sup>60</sup>

b. KRMH Wuryaningrat

Sebagai salah seorang tokoh anti Belanda di keraton, dapat dipastikan bahwa Wuryaningrat merupakan pendukung gagasan Indonesia merdeka. Kecerdikan dan kelihaiannya dalam berpolitik menyebabkan ia

---

<sup>59</sup> *Bundel Masalah Peta*. S. 4272. Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran.

<sup>60</sup> Anton E Lucas, 1989, *Peristiwa Tiga Daerah, Revolusi dalam Revolusi*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hal. 93-94.

sangat dibenci oleh Belanda. Kedudukan Wuryaningrat di dalam keraton sempat tersudut ketika kelompok pendukung Belanda di bawah Hangabehi (Paku Buwono XI) memenangkan konflik suksesi pada tahun 1939. Tersingkirnya Wuryaningrat dari arena politik Keraton terobati dengan kedatangan tentara Jepang.

Mengingat posisi dan kedudukan politiknya pada masa kolonial, tentara Jepang memberikan kepercayaan kepadanya untuk menempati jabatan-jabatan penting dalam pemerintah pendudukan. Wuryaningrat diberi kedudukan sebagai pemimpin Gerakab Tiga A di Surakarta. Akan tetapi kegagalan Gerakan Tiga A menyebabkan pembubaran komisi Tiga A. Walaupun Gerakan Tiga A ini gagal, karir politik Wuryaningrat tidak berhenti melainkan meningkat dengan cepat. Wuryaningrat dipercaya sebagai anggota *Chuo Sangi-in* pada tahun 1943 (Dewan Pertimbangan Pusat) yang berkedudukan di Jakarta. Kedudukan *Chuo Sangi-in* pada masa pendudukan Jepang sangat berarti karena dewan tersebut merupakan lembaga tertinggi bagi masyarakat pribumi. *Chuo Sangi-in* tidak memiliki kewenangan dalam menentukan garis kebijakan, namun beberapa saran dan usul *Chuo Sangi-in* terbukti merupakan salah satu program politik Jepang di Indonesia. Salah satu program tersebut adalah pengerahan romusha dan pembentukan Badan Pembantu Prajurit.<sup>61</sup>

Pembubaran *Chuo Sangi-in* yang diganti dengan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia / *Dokuritsu Junbai*

---

<sup>61</sup> Arniati Prasedyawati Herkusumo, 1982, *Chuo Sangi-in, Dewan Pertimbangan Pusat Pada Masa Pendudukan Jepang*, Jakarta: P.T. Rosda Jayaputra, hal. 85.

*Tyosakai*) membawa serta Wuryaningrat sebagai anggota BPUPKI. Pada saat janji kemerdekaan telah semakin mendekat, BPUPKI yang kemudian menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia / *Dokuritsu Junbi Inkai*) menjadi dewan tertinggi bagi para politisi Indonesia.<sup>62</sup> Wuryaningrat kembali terpilih menjadi anggota PPKI sehingga sejak tahun 1943 kehidupan politiknya secara praktis telah terpisah dengan Surakarta. Akan tetapi ketika kemerdekaan itu tiba Wuryaningrat memilih kembali ke Surakarta untuk bekerjasama dengan bekas anak didiknya yaitu Sumodiningrat untuk membangun lembaga pendukung kemerdekaan.

## 2. Peran Bangsawan Pada Awal Proklamasi

Posisi tempur Jepang semakin melemah dan propaganda kemerdekaan di Indonesia semakin meluas. Hal ini menyebabkan kaum intelektual dan politisi di Jawa resah. Mereka khawatir dan takut akan kemungkinan kembalinya Belanda di Indonesia mengakibatkan bangkitnya semangat-kemerdekaan. Pada mulanya jalinan semangat ini berkembang menjadi jaringan komunikasi antara aktivis politik di kota-kota besar di Jawa, namun dalam perkembangannya semakin meningkat menjadi gerakan nasionalis bawah tanah yang menyerupai gerakan nasionalisme masa kolonial.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, hal. 16.

<sup>63</sup> Rudolf Mrazek, 1996, *Sjahrir, Politik dan Pengasingan di Indonesia*. Terjemahan: Mochtar Pabottinggi, Matheus Nalle, S. Maimoen, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal.. 556.

Menjelang awal bulan Agustus 1945, di Surakarta telah terbentuk gerakan bawah tanah yang memiliki hubungan erat dengan Wuryaningrat dan Sumodiningrat yang juga menjadi pelindungnya. Kegiatan yang dilakukan oleh gerakan ini ialah mendengarkan siaran radio internasional (Australia) tentang situasi perang di Pasifik dan Eropa yang dilakukan di rumah dr. Satiman. Dalam kegiatan ini mereka melakukan evaluasi, menganalisis dan menentukan sikap dalam gerakan perjuangan. Kegiatan yang berlangsung secara sembunyi-sembunyi itu bahkan terus berlanjut hingga berita bom atom tersebar luas.<sup>64</sup>

Mengingat kekalahan Jepang yang kian dekat, para aktivis politik di Surakarta menyusun rencana kemerdekaan. Pada 11 Agustus 1945 pemimpin pergerakan politik M. Suprpto mengirim utusan yang terdiri A. Royis Ismangunwinoto dan Martomulyono untuk bertemu Suyoko dan Suryopranoto dari perwakilan Asrama Menteng 31 dan Sutan Syahrir di Jakarta supaya mengetahui langkah-langkah yang harus ditempuh.<sup>65</sup> Tokoh politik di Jakarta menerangkan untuk bersabar menanti kepastian kepulauan Sukarno dan Hatta dari markas tentara Jepang di Dalat, Vietnam. Sepulangnya dari Jakarta, utusan tersebut singgah terlebih dahulu di Cirebon, Pekalongan dan Semarang untuk memberitahukan informasi kepada tokoh-tokoh politik lokal.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Panitia Pelaksana Pembangunan Monumen, 1985, *Perebutan Kekuasaan dan Pertempuran Kenpetai di Surakarta*, Surakarta: t.p., hal. 11.

<sup>65</sup> Panitia Pelaksana Pembangunan Monumen, *op.cit.*, hal. 15.

<sup>66</sup> Jaringan ini berkaitan dengan Kromolawi yang berada di Pekalongan. Kromolawi merupakan salah satu tokoh utama dalam Peristiwa Tiga Daerah. Panitia Pembangunan Monumen, *op.cit.*, hal. 18.; Anton E. Lucas, *op.cit.*, hal. 103.

Untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan datang, pada tanggal 15 Agustus 1945 para pemimpin pergerakan politik di Surakarta membentuk sebuah panitia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Panitia yang dibentuk secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Jepang tersebut bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia di Surakarta. Adapun susunan panitia tersebut seperti di bawah ini:

Ketua : KRMH Wuryaningrat  
Wakil Ketua : KPH Handayaningrat  
Panitera : RT Sutejo Brojonegoro  
Anggota : dr. Kartono Martosuwignyo (jawatan kesehatan)  
R. Sutopo Adisaputro<sup>67</sup>

Setelah berita proklamasi kemerdekaan dibacakan di Jakarta, Panitia Pelaksana Kemerdekaan menempatkan dirinya sebagai lembaga pendukung usaha republik di Surakarta. Berbagai kegiatan dilakukan oleh Panitia, salah satunya ialah menjadi kantor tempat informasi dan koordinasi sementara bagi para pendukung republik di Surakarta. Panitia pun berjasa dalam mengumpulkan berbagai bekas anggota Peta dan *Seinendan* yang telah dibubarkan oleh Jepang pada 16 Agustus 1945. Selain itu Panitia mengambil alih kegiatan Badan Penolong Prajurit di Surakarta.<sup>68</sup>

Beberapa bidang yang tidak diambilalih oleh Panitia ialah administrasi pemerintahan karena pada tanggal 18 Agustus 1945 di daerah Surakarta

---

<sup>67</sup> Panitia Pelaksana Pembangunan Monumen, *op.cit.*, hal. 14-16.; Anton Lucas, *op.cit.*, hal. 92.

<sup>68</sup> *Bundel Masalah PETA*. S.4272. Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran.



ditetapkan secara resmi sebagai Daerah Istimewa baik Daerah Istimewa Surakarta (Kasunanan) dan Daerah Istimewa Mangkunegaran. Pemerintahan kerajaan tetap dipertahankan di Surakarta dengan dua pemerintahan yang terpisah sejak tahun 1896.<sup>69</sup> Selain itu penjatahan makanan dan pakaian serta pengumpulan kedua bahan tersebut tidak dilakukan oleh Panitia karena tugas tersebut masih dipegang oleh kedua kerajaan untuk wilayahnya masing-masing.<sup>70</sup> Hal tersebut jelas sangat berbeda dengan pelaksanaan pemerintahan di tempat lainnya di luar kerajaan di Jawa, karena tugas pengumpulan bahan pangan dan pakaian pada umumnya dilakukan oleh *Hokokai* setempat.<sup>71</sup> Perbedaan tersebut terjadi karena pemerintah militer Jepang lebih memilih untuk menyerahkan masalah pengumpulan dan propaganda yang bersifat eksploitatif kepada kedua kerajaan mengingat tidak ada satu pun kekuatan sosial politik di Surakarta yang mampu menandingi kedua kerajaan tersebut.<sup>72</sup>

Pada masa awal proklamasi pun Panitia dituntut untuk berhati-hati karena kekuatan militer Jepang dengan persenjataan lengkap masih bertugas di surakarta untuk memnuhi tuntutan tugas dari Sekutu. Perubahan sikap dari panitia mulai terjadi ketika sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 merubah diri menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan disusul dengan sidang pada 22 Agustus 1945 yang mengharapkan pembentukan

---

<sup>69</sup> Honggopati Tjitrohupojo, 1930, *Serat Pengetan (Nakayama)*, Surakarta: Reksa Pustaka, hal. 34.

<sup>70</sup> *Bundel Pengumpulan Pakaian*, S. 4275. Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran.

<sup>71</sup> *Memperingati 1 Tahun Hokokai Surakarta dalam Berkas Masalah Hokokai*, S. 4272. Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran.

<sup>72</sup> *Osamu Seirei No. 2 tahun 1944*. S. 4221. Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran.

badan-badan serupa di daerah-daerah dalam rangka melegitimasi kedaulatan republik di daerah-daerah dan merebut kekuasaan Jepang ke tangan republik.<sup>73</sup>

Dalam kasus Surakarta tampaknya hal tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan daripada daerah-daerah lainnya yang berada di bawah kekuasaan kolonial. Bagi daerah-daerah kolonial pengalaman setiap daerah dalam ruang lingkup kota untuk membentuk dewan rakyat yang terdiri dari pluralisme telah teruji sejak masa kolonial sedangkan untuk daerah kerajaan fungsi badan perwakilan hanya sebatas pada anggota keluarga kerajaan.<sup>74</sup>

Upaya untuk membentuk Komite Nasional Daerah Surakarta tampaknya mengalami kesulitan karena timbulnya pertentangan dengan kedua kerajaan dapat mengganggu jalannya peralihan kekuasaan mengingat kedua kerajaan telah diakui republik walaupun pihak kerajaan berhati-hati menanggapi. Akan tetapi situasi politik di Surakarta dengan cepat berkembang pada ketegangan yang semakin memuncak. Perebutan gedung-gedung pemerintahan dan fasilitas umum yang dilakukan pemuda tidak terlepas dari upaya Panitia untuk memobilisasi pemuda. Sebuah laporan memberitahukan bahwa rapat-rapat Panitia telah sampai ke arah pembentukan kedaulatan republik dengan pendirian badan perwakilan.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Suhartono, 2001 *Revolusi Agustus: Nasionalisme Terpasung dan Diplomasi Internasional*. Yogyakarta: Lapera,; George McTurnan Kahin, 1995, *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Penerjemah: Nin Bakdi Soemanto, Surakarta: UNS Press, hal. 177.

<sup>74</sup> Soedarmono, *op.cit.*, hal. 68-69.

<sup>75</sup> *Ibid.*,

## B. Komite Nasional Indonesia Daerah Surakarta

Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menyatakan tentang perubahan nama PPKI menjadi KNIP yang untuk sementara bertugas sebagai dewan pembantu Presiden. Keputusan ini diteruskan melalui sidang KNIP pada tanggal 22 Agustus 1945 yang menyatakan pembentukan Komite Nasional di daerah-daerah yang bertujuan untuk membentuk pemerintahan sementara di daerah-daerah dalam kekuasaan Republik.

Adapun tujuan dari pembentukan Komite Nasional di daerah-daerah ialah:

- 1) Melucuti tentara Jepang
- 2) Memindahkan kekuasaan pemerintah Jepang ke tangan KND.<sup>76</sup>

Berdasarkan hal tersebut pembentukan Komite Nasional diharapkan agar secepat mungkin melakukan tugasnya dalam rangka penegakan kedaulatan republik. Akan tetapi permasalahan utama dari pembentukan komite ini ialah keberadaan tentara Jepang yang memang disertai urusan penjagaan keamanan dan status quo oleh Sekutu. Tentara Jepang tersebut merupakan kekuatan tempur yang sangat kuat mengingat lengkapnya persenjataan yang dimiliki oleh mereka.<sup>77</sup>

Permasalahan lainnya dalam mendirikan komite di daerah ialah masih berkuasanya para birokrasi pribumi yang sebagian besar merupakan warisan dari masa pemerintahan kolonial. Kaum birokrasi pribumi yang sebagian besar merupakan abdi-abdi setia kekuasaan. Mereka telah terbiasa sebagai hamba

---

<sup>76</sup> Lihat Djawatan Penerangan Kota Besar Surakarta, 1953, *Kenang-kenangan Kota Besar Surakarta, 1945-1953*. Surakarta: t.p., hal. 2-3.

<sup>77</sup> George McTurnan Kahin, *op.cit.*, hal. 186.

kekuasaan apapun juga selama kekuasaan dan jabatan mereka dapat dipertahankan. Selain itu kaum birokrasi pribumi yang terbiasa dengan kesadaran politik yang tinggi menyadari bahwa proklamasi kemerdekaan tidak memiliki landasan hukum apapun juga dari sistem hukum internasional yang berlaku dan menyebabkan mereka untuk memposisikan diri kepada para pemenang Perang Dunia II. Hal ini menjadi salah satu penyebab dari meningkatnya kekerasan di daerah-daerah yang ditujukan untuk penggulingan tatanan lama pemerintahan pribumi.<sup>78</sup>

Fenomena tersebut terjadi pula di Surakarta, dimana kekuasaan pribumi yang direpresentasikan oleh raja-raja yang secara otomatis menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di Surakarta mencoba untuk mengukuhkan kekuasaannya. Hal ini bertentangan dengan keinginan para politisi dan pejuang di Surakarta yang menginginkan agar mobilitas politik di Surakarta bersifat secara terbuka dan oportunistik kekuasaan dari para politisi tersebut. Naam, pihak kerajaan melakukan sebuah kesalahan pada masa tersebut dengan tidak menganggap penting radikalisme di Surakarta dan menganggap bahwa kekuasaan di Surakarta dengan sah masih berada di tangan para raja yang bekerjasama dengan tentara Jepang untuk membangun keamanan yang bersifat sementara.<sup>79</sup>

Kelambanan kerajaan dalam menanggapi tuntutan dari para pejuang dan pemerintah Republik menyebabkan Surakarta sangat lambat dalam pendirian

---

<sup>78</sup> Konflik politik di Pekalongan merupakan salah satu contoh, lihat Anton E. Lucas, *op.cit.*; konflik politik di Banten., Ben Anderson, 1988, *Revolusi Pemoeda. Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa, 1944-1946*, Terjemahan: Jiman Rumbo, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal. 369.

<sup>79</sup> Anthony Reid, 1987, *Perjuangan Rakyat, Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera*. Penerjemah: Tim PSH, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal. 245.

pemerintahan di bawah Republik daripada tetangganya di Yogyakarta. Walaupun pihak kerajaan telah diberi pengakuan kedaulatan kekuasaan raja oleh pemerintah RI namun pihak kerajaan terkesan sangat berhati-hati dalam menghadapi kekuasaan Jepang. Lambannya usaha pihak kerajaan di Surakarta dalam menegakkan kekuasaan republik dan perebutan senjata dari Jepang menyebabkan pemerintah pusat RI campur tangan untuk membentuk Komite Nasional di Surakarta. Hal ini mendapat sambutan antusias dari Panitia. Kerjasama antara pemerintah pusat RI dan Panitia tampaknya tidak terlepas dari peranan para tokoh Panitia yang telah memiliki hubungan dekat dengan para petinggi Republik semenjak masa kolonial. Keterlibatan Wuryaningrat dalam Parindra dan Gerindo di Surakarta serta Sumodiningrat dalam Parindra dan keterlibatan aktif kedua nama tersebut pada masa pemerintahan Jepang menyebabkan mudahnya kedua orang tersebut membentuk jaringan komunikasi yang dapat digunakan dalam kepentingan praktis. Sebuah catatan rahasia dari Mangkunegaran menyebutkan bahwa kedua orang itulah yang menjadi aktor utama dalam pembentukan Komite Nasional di Surakarta dan meminta bantuan dari pemerintah republik.<sup>80</sup>

Berdasarkan petunjuk pemerintah pusat KNIDS yang meliputi Karesidenan Surakarta untuk sementara waktu menggantikan fungsi kepemimpinan lokal. Sedangkan sebagai tempat pelaksanaan rapat KNIDS ditempatkan di bekas Hotel Yuliana – Purbayan yang juga merupakan Markas Komando Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Surakarta dan tempat berkumpulnya tokoh-tokoh

---

<sup>80</sup> *Berkas Masalah Cinta Swapraja*. S. 2342. Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran.

revolusioner di Surakarta dimana banyak badan perjuangan turut berkumpul untuk mempersiapkan jalannya revolusi di Surakarta.<sup>81</sup>

Agar lebih mewakili semua pihak maka KNIDS yang berintikan Panitia dikembangkan dengan menambah jumlah anggotanya yaitu Soeprapto, H. Moefti, GPH. Suryohamijoyo, KRT. Mangundiningrat, Sutopo Adisaputro, I. J. Kasimo, Mulyadi Joyomartono, dan Suyono. Rapat pertama KNIDS pada tanggal 9 September 1945 yang bertempat di Sriwedari dipimpin oleh Menteri Negara Mr. R.M. Sartono dan dihadiri pula oleh utusan pemerintah Mr. A.A. Maramis dimana dalam rapat tersebut diadakan pelantikan anggota KNIDS.<sup>82</sup>

Pada tanggal 11 September 1945 diadakan rapat di pendopo Wuryaningratan (sekarang Jl. Slamet Riyadi No. 227). Pada kesempatan ini disepakati untuk membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah Surakarta (KNIDS) yang menguasai seluruh wilayah Surakarta yaitu daerah kerajaan Surakarta dan Mangkunegaran dan merangkap sebagai pemerintahan umum di kota Surakarta. Selain itu rapat bertujuan untuk membentuk struktur kepengurusan KNIDS. Pembentukan struktur kepengurusan KNIDS dibentuk layaknya struktur-struktur pemerintahan lainnya yang mempertimbangkan pengembangan kondisi sosial politik. Beratnya tugas yang harus ditanggung KNIDS terutama dalam sektor keamanan, pertahanan dan perbutan kekuasaan militer Jepang

---

<sup>81</sup> Djawatan Penerangan Kota Besar Surakarta, 1953, *Kenang-kenangan Kota Besar Surakarta, 1945-1953*, Surakarta: t.p., hal. 2-3. KNIDS merupakan Komite Nasional untuk tingkat karesidenan.

<sup>82</sup> Panitia Pelaksana Pembangunan Monumen, *op.cit.* hal. 25. Keanggotaan KNIDS terdiri dari dua latar belakang politik yaitu dari kalangan rakyat dan Kasunanan. Anggota Kasunanan ialah GPH Suryohamijoyo (putra Pakubuwono X.), KRT Mangundiningrat dan I.J. Kasimo. Lih. Larson, *op.cit.*, hal. 311. Dengan dibentuknya KNIDS maka terlihat sikap mendua dari pemerintah. Pada saat yang bersamaan pemerintah mengesahkan pihak kerajaan sebagai lembaga kekuasaan resmi namun menunjuk KNIDS untuk mengambil alih kekuasaan Jepang.

menyebabkan kebijakan-kebijakan militer dirasakan tepat untuk menghadapi situasi kemananan pada masa tersebut.<sup>83</sup>

Pertimbangan militer strategis untuk situasi tersebut menyebabkan kedudukan militer dinilai sangat penting untuk menghadapi tantangan pada masa tersebut. Oleh karena itu latar belakang kemiliteran dinilai tepat untuk menduduki kepengurusan KNIDS. Wuryaningrat sebagai seorang politisi tidak memiliki latar belakang militer karena selama karir politiknya lebih dicurahkan untuk kepentingan politik sipil. Hal ini menyebabkan dia dinilai kurang tepat untuk menghadapi situasi kemiliteran di Surakarta. Pertimbangan untuk mencari sosok militer jatuh kepada para pemimpin militer Pembela Tanah Air (Peta) di Surakarta antara lain Mr. B.P.H. Sumodiningrat (bekas *Cudancho Dai-yong Cutai Dai-Ichi Daidan* / Komandan Kompi Batalyon I Peta Manahan), R. Mulyadi Joyomartono (bekas *Daidancho Dai-Ichi Daidan* / Komandan Batalyon Peta Wonogiri), G.P.H Jatikusumo (bekas *Cudancho Dai-Ichi Cutai Dai-Ichi Daidan* / Komandan Kompi Batalyon Manahan), K.P.H. Hamijoyo Santoso (*Cudancho Dai-Ni Cutai Dai-Ichi Daidan* / Komandan Kompi Batalyon Manahan).<sup>84</sup>

Tidak diketahui dengan pasti apakah pemilihan ketua KNIDS yang didasari oleh pertimbangan militer ini merupakan upaya pemerintah republik dalam mempercepat pengukuhan kedaulatan RI di Surakarta atau hanya upaya untuk menggeser Wuryaningrat sebagai salah satu tokoh Republik paling kuat dan berpengaruh di Surakarta yang berpotensi besar dalam memenangkan pemilihan ketua KNIDS. Namun terlepas dari kemungkinan-kemungkinan tersebut dengan

---

<sup>83</sup> Karkono Kamajaya, "Revolusi di Surakarta". Temu Ilmiah Balai Kajian Jarahnitra Depdikbud, Yogyakarta, Sabtu, 28 Agustus 1993.

<sup>84</sup> Panitia Pelaksana Pembangunan Monumen, *op.cit.*, hal. 24.

mencuatnya tokoh-tokoh Peta yang mengisi calon kandidat ketua KNIDS menyebabkan proses pemilihan berjalan terus tanpa adanya hambatan apapun.

Penunjukkan ketua KNIDS dilakukan dengan pemilihan oleh para peserta rapat. Rapat tersebut dihadiri oleh 144 peserta yang berasal dari seluruh Surakarta. Pada umumnya mereka adalah para politisi dan pejuang yang tergabung dalam barisan-barisan perjuangan dan laskar di Surakarta dimana beberapa di antaranya telah melakukan penyerobotan-penyerobotan terhadap fasilitas publik di Surakarta antara lain gedung-gedung pemerintahan maupun industri-industri gula di Surakarta. Pemungutan suara yang dilakukan dalam pemilihan ini memenangkan Mr. B.P.H. Sumodiningrat. Adapun hasil pemungutan tersebut seperti di bawah ini:

Mr. B.P.H. Sumodiningrat	94 suara
G.P.H. Jatikusumo	36 suara
R. Mulyadi Joyomartono	12 suara
K.P.H. Hamijoyo Santoso	2 suara

Dengan terpilihnya Mr. B.P.H. Sumodiningrat sebagai ketua, maka ia diberi kewenangan untuk menyusun struktur kepengurusan KNIDS. Struktur kepengurusan KNIDS pimpinan Sumodiningrat sebagai berikut:

Ketua	: Mr. B.P.H. Sumodiningrat
Wakil Ketua	: M. Suprpto (peradilan)
Wakil Ketua	: dr. Kartono Martosuwignyo (kesehatan dan cendekiawan)
Wakil Ketua	: R. Sutopo Adisaputro (pendidikan)
Wakil Ketua	: K.H. Abdul Mufti (Islam)



Wakil Ketua	: R.M. Hendrokusumo (pemuda)
Wakil Ketua	: Suyono (pergerakan rakyat dan ex-Digulis)
Wakil Ketua	: R.Ng. Domopranoto (kepolisian)
Wakil Ketua	: Mr. Sukasno (cendekiawan)
Sekretaris I	: R. Sumodiharjo
Sekretaris II	: R. Seno
Bendahara I	: R. Martoraharyo
Bendahara II	: R. Suyono Humardani <sup>85</sup>

Melalui kepemimpinan KNIDS, maka perpolitikan di Surakarta memasuki masa baru yang akan mempengaruhi kelanjutan dari kedupan politik di Surakarta. Hal ini akan terbukti dalam kehidupan politik di Surakarta setelah dibentuknya KNIDS dimana akan muncul persaingan dan pertentangan politik dengan kerajaan.

### **C. Pengelompokan Politik di Surakarta**

Menurut Soedarmono, pengelompokan sosial politik yang terjadi pada masa revolusi kemerdekaan di Surakarta terbagi menjadi tiga bentuk yang disebabkan orientasi politik pada pemerintahan lokal, yaitu: 1.) Kelompok pendukung Swapraja, 2.) Kelompok Moderat dan 3) Kelompok Anti Swapraja.<sup>86</sup> Pembagian tersebut dapat dijadikan acuan mengingat begitu kompleksnya permasalahan bila ditinjau dari partisipasi politik tiap individu di Surakarta.

#### **1). Kelompok Pendukung Swapraja**

---

<sup>85</sup> Panitia Pelaksana Pembangunan Monumen, *op.cit.*, hal. 25.

<sup>86</sup> Soedarmono, *op.cit.*, hal. 41

Kelompok pendukung Swapraja didasari oleh keinginan sebagian anggota masyarakat untuk mempertahankan sistem pemerintahan kerajaan tanpa adanya perubahan status kerajaan yang telah ada. Sebagian besar *aktor intelektual* anggota kelompok ini berasal dari kelompok bangsawan yang memegang kedudukan pada jabatan di kerajaan. Selain itu terdapat pula kelompok masyarakat yang secara historis merupakan upaya mobilisasi massa yang dilakukan pihak kerajaan.<sup>87</sup>

Kelompok sosial ini berusaha mengorganisir diri untuk mengkonsolidasikan kekuatannya dalam menghadapi tantangan yang muncul dalam penolakan swapraja. Kelompok-kelompok yang tergolong dalam gerakan ini selain pemegang kekuasaan di Kasunanan dan Mangkunegaran antara lain, 1) Gerakan Narpowandowo, 2) Pakempalan Kawula Surakarta, 3) Pemuda Trah Surakarta, 4) Dewan Pamong Kerabat Surakarta, 4) Legiun Mangkunegaran, 5) Pakempalan Kerabat Mangkunegaran.<sup>88</sup>

## 2). Kelompok Moderat

Kelompok sosial yang menginginkan perubahan sistem kerajaan tanpa menghapus kerajaan digolongkan pada kelompok moderat.<sup>89</sup> Kelompok ini lebih didasarkan pada kesadaran individu dalam memandang perubahan sosial di Surakarta dan keinginannya mempertahankan tradisi.

---

<sup>87</sup> K. R. M. H. Woerjaningrat. *Sekedar Uraian Tentang Swapraja Surakarta Setelah Proklamsai Kemerdekaan*, Surakarta: t.t, t.p., hal. 4.

<sup>88</sup> Soedarmono, *op.cit.*, hal. 42.

<sup>89</sup> K.R.M.H. Woejaningrat, *op.cit.*, hal. 4.

Pada umumnya mereka adalah individu-individu yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan kerajaan. Akan tetapi tingginya latar belakang pendidikan menyebabkan perkembangan kepekaan dan kesadaran mereka dalam menghadapi perubahan-perubahan sosial politik baik yang bersifat situasional maupun evolusioner. Di antara beberapa orang yang tergabung dalam gerakan ini yang berasal dari Kasunanan ialah K.P.H. Handyaningrat, R.T. Sutejo Brodjonegoro, G.P.H. Suryohamijoyo. Selain itu terdapat nama-nama GPH Purbonagoro, GPH Joyokusumo, Pangeran Mangkubumi, dll.<sup>90</sup> yang merupakan orang-orang dengan derajat kebangsawanan tinggi di keraton. Dari golongan Mangkunegaran terdapat beberapa nama, yaitu Sunarto Koesoemodirdjo, Mr. Amir Singgih, Mr. Atmodiningrat, Mr. Mohamad Dalyono.<sup>91</sup> Sedangkan dari golongan sipil terdapat nama I.J. Kasimo.

Terlibatnya anggota Kasunanan yang mendominasi gerakan ini menunjukkan munculnya suasana ketidakharmonisan dalam Kasunanan. Hal ini disebabkan oleh permasalahan penggantian tahta pada tahun 1939 yang disusul dengan kematian cepat Pakubuwono XI pada tahun 1944 dan digantikan oleh Pakubuwono XII yang berada di bawah pengaruh Jepang yang menyebabkan semakin kompleksnya konflik-konflik politik dari tiap-tiap kelompok yang bersaing dalam memperebutkan kekuasaan. Oleh sebab itu

---

<sup>90</sup> Panitia Pelaksana Pembangunan Monumen, *op.cit.*, hal.14.

<sup>91</sup> Soedarmono, *op.cit.*, hal.47.

muncul rasa tidak puas dari beberapa kalangan kerabat Kasunanan untuk memanfaatkan revolusi agar mampu mendapatkan porsi kekuasaan.<sup>92</sup>

### 3) Kelompok Anti Swapraja

Penelusuran mobilisasi sosial politik yang kemudian berkembang menjadi penolakan kerajaan dapat dilakukan sejak masa pemerintahan kolonial hingga masa kemerdekaan dimana mobilisasi massa dilakukan secara intensif. Mobilisasi massa tersebut pada akhirnya berkembang menjadi gerakan-gerakan yang menentang kerajaan. Hal ini dapat terlihat dari gerakan Jawadipa yang diusung oleh SI dan Gerakan Anti Rajanya Indsulinde serta pemberontakan PKI tahun 1926 yang tumbuh subur di Surakarta. Peristiwa-peristiwa tersebut menandakan bahwa daerah Surakarta merupakan potensi bagi mobilisasi sosial politik yang dikarenakan keberagaman penduduk Surakarta baik secara budaya maupun kesenjangan sosial ekonomi yang terpisah secara tajam.<sup>93</sup>

Penangkapan para tokoh radikal dan melemahnya dominasi politik non bangsawan di Surakarta terjadi yang terjadi hingga keruntuhan kekuasaan kolonial membuat kekuasaan kerajaan menjadi stabil.<sup>94</sup> Akan tetapi Jepang membebaskan tokoh politik yang berada di Digul, penggunaan intelektual pribumi dan mobilisasi pemuda oleh tentara Jepang merupakan kondisi sosial

---

<sup>92</sup> Larson, *op.cit.*, hal. 288-303.

<sup>93</sup> Suhartono, 1995, *Bandit-Bandit Pedesaan di Jawa. Studi Historis 1850-1942*, Yogyakarta: Aditya Media, hal. 41.

<sup>94</sup> Penangkapan para pemberontak PKI 1926 serta pemberontakan kapal Zeven Provincien. Lihat Suyatno Kartodirjo, "Pemberontakan Kapal Zeven Provincien". Prisma Agustus 1983.

politik pada masa pendudukan Jepang walau penolakan dan dendam para politisi ini masih dapat diredam oleh Jepang. Para tokoh ex-Digulis yang berada di Surakarta ialah Ronomarsono, Kartopandoyo, Suyono, H. Dasuki, Wongso Sud, A. Rois.<sup>95</sup>

Pada saat proklamasi aktivis-aktivis politik tersebut bermunculan untuk mengambil perana aktif dalam perpolitikan di Surakarta. Hal tersebut meramaikan aktivitas politik di Surakarta yang telah meningkat dengan mobilisasi massa pada pendudukan Jepang sehingga ketika kemerdekaan mereka terkumpul dari berbagai macam latar belakang. Tokoh-tokoh yang berasal dari bekas pegawai di jawatan Jepang di Surakarta seperti dr. Kartono Martosuwignyo (pegawai kesehatan), M. Suprpto (Peradilan Negeri), H. Asnawi Hadisiswoyo, KH Abdul Mufti, H. Surono Wiroharjono (Islam), Ismangun Wiyoto, Samsu Haryaudaya (Taman Siswa). Tokoh-tokoh lokal di Surakarta yang berasal dari militer seperti Ranuwijoyo, Suharto (PETA), Sujono Humardani, Iskandar Kusumodirjo (Seinendan), Mangkusudiyono, Sumokartiko (Keibodan). Sedangkan dari barisan pemuda terdapat beberapa tokoh yaitu Maladi (bekas ketua Indonesia Muda yang merupakan wakil kepala Jawatan Radio Surakarta dan ketua Angkatan Muda Indonesia), Sutarto, Wukiran, Notowardoyo (Menteng 31), Suyatno Yosodipuro, Sukarno, Harsono, Suryowirawan (Markas Delapan).<sup>96</sup>

Selain kehadiran para politisi tersebut muncul pula kekuatan-kekuatan bersenjata yang mendukung kemerdekaan meramaikan peta kekuatan politik

---

<sup>95</sup> Panitia Pelaksana Pembangunan Monumen, *op.cit.*, hal. 9.

<sup>96</sup> Panitia Pelaksana Pembangunan Monumen, *op.cit.*, hal. 26.

di Surakarta. Pada bulan Desember hadir Barisan Pelopor yang hijrah dari Jakarta seiring dikuasainya kota Jakarta oleh Sekutu. Barisan Pelopor yang kemudian berubah menjadi Barisan Banteng merupakan kekuatan bersenjata yang paling berpengaruh di Surakarta pada masa kemerdekaan terutama dalam Gerakan Anti Swapraja.<sup>97</sup>

Kehadiran kelompok-kelompok bersenjata tersebut disebabkan oleh keputusan pemerintah Jepang untuk membubarkan Peta, Heiho dan Seinendan pada tanggal 15 Agustus 1945 dan keterlambatan pemerintah dalam membentuk badan militer nasional yaitu Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada 18 Agustus 1945.<sup>98</sup> Pembentukan BKR di Surakarta baru dilakukan pada tanggal 29 Agustus 1945 yang penetapannya disahkan pada tanggal 9 September 1945 dan pengambilan sumpah pimpinan BKR baru dapat dilaksanakan pada 19 September 1945 di Stadion Sriwedari.

BKR Surakarta dipimpin oleh R.M. Mulyadi Joyomartono bekas Daidanco Dai-Ichi Didan Manahan.<sup>99</sup> Kehadiran BKR ini setidaknya mampu mengumpulkan beberapa kelompok bersenjata yang terpisah salah satunya ialah Markas Delapan yang berada di bawah pimpinan Tukiran Notowardoyo dan menjadi Polisi Tentara Keamanan Rakyat (PTKR) yang berfungsi sebagai polisi militer dari BKR. Dalam PTKR bergabung pula seluruh pasukan bekas Kenpei-Ho (Polisi Militer Pribumi masa pendudukan Jepang), bekas Yogeki

---

<sup>97</sup> *Pidato Mangkunegaran dalam Pelatihan Suisintai dalam Kumpulan Pidato-pidato Mangkunegara dan Pejabat*. S. 3638. Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran.

<sup>98</sup> Ben Anderson, *op.cit.*, hal. 116.

<sup>99</sup> *Surat Pemberitahuan Pendirian BKR Kepada Mangkunegaran Kooti, 1945*. S. 639. Arsip Reksa Putaka Mangkunegaran.

Butai dan Seinendan. Selain itu dibentuk pula Badan Pengawas Umum (BPU) yang merupakan bagian dari BKR yang di dalamnya terdapat K.P.H. Hamijoyo Santoso (adik Mangkunegara VIII dan bekas Cudanco Daichi Daidan Wonogiri).<sup>100</sup>

Akan tetapi kehadiran BKR ini tidak mampu menggabungkan seluruh kekuatan militansi di Surakarta. Hal ini terlihat dari adanya gabungan bekas tentara yang menamakan dirinya Angkatan Muda Tentara (AMT) yang sebagian besar berasal dari kesatuan Peta Wonogiri, Kaigun, Heiho dan Pelayaran dimana terdapat tokoh Slamet Riyadi, Rujito, Sutarto, dan Sentot Sugriwo.<sup>101</sup>

Kehadiran BKR untuk menyerap badan-badan perjuangan tidak mampu terlaksana secara sempurna bahkan setelah pendirian BKR masih tumbuh beberapa organisasi bersenjata di Surakarta. Beberapa organisasi militan lainnya yaitu Gerakan Rakyat Indonesia (GRI/pada akhirnya merupakan kekuatan bersenjata dari PNI), Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI), Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Tentara Pelajar (TP) di bawah pimpinan Achmadi, Laskar Rakyat di bawah pimpinan Iskandar Kusumodirdjo, Barisan Semut Ireng, dan LBI.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> BPH Hamijoyo Santoso tidak termasuk Gerakan Anti Swapraja dimana pada masa konflik dia menduduki jabatan Wedana Satria, *Bendel Rupa-rupa 1946*. S. 934. Arsip Rekza Pustaka Mangkunegaran.

<sup>101</sup> Panitia Pelaksana Pembangunan Monumen, *op.cit.*, hal. 26-27.

<sup>102</sup> Pembentukan laskar rakyat pada mulanya ditujukan untuk mengkoordinasi badan-badan perjuangan yang ada dengan dikeluarkannya maklumat tertanggal 13 November 1945. *Kedaulatan Rakyat*. 13 November 1945. Dokumen Monumen Pers.

Selain itu muncul beberapa organisasi perjuangan lokal di tiap-tiap daerah di Surakarta antara lain: Laskar Rakyat Surakarta di desa Plupuh (Sragen), Pemuda Laskar Rakyat , Pemuda Penjaga Desa , Pelopor Laskar Rakyat dan Markas Pertahanan Desa dan Laskar Alap-alap.<sup>103</sup> Organisasi pertahanan lokal yang dibentuk di pedesaan ini pada umumnya terbentuk pada tahun 1946. Mereka terdiri dari pemuda desa, pemimpin politik dan tokoh agama. Nama organisasi ini berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Orientasi perjuangan barisan tidak hanya berkembang dalam hubungan komunitas badan perjuangan, akan tetapi pula memiliki hubungan dengan partai-partai yang ada. Maklumat Wapres No. X tahun 1945 yang mengatur tentang pendirian partai-partai politik di Indonesia menyebabkan munculnya organisasi bersenjata yang didasarkan kepentingan partai-partai yang terkait.<sup>104</sup> Hal ini seperti diperlihatkan dengan kehadiran Pesindo Surakarta di bawah Partai Sosialis (PS), Hisbullah di bawah Masyumi, dll.

#### **D. Radikalisasi Massa di Surakarta**

Meningkatnya radikalisasi massa di Surakarta pada masa revolusi terkait dengan pendirian badan pemerintahan di Surakarta yang menitikberatkan kepada kedaulatan republik di Surakarta. hal ini berarti memperlihatkan adanya jalinan

---

<sup>103</sup> Suyatno K. dalam Budi Santoso, 1994, *Politik Penguasa dan Siasat Pemoeda, Nasionalisme dan Pendudukan Jepang di Indonesia*, Yogyakarta: Kanisisus & LSR, hal.65; Suyatno Kartodirdjo. *Revolutions and Social Tensions in Surakarta*. Translated: Benedict Anderson. Journal Indonesia Cornell University. No. 17. 1974. hal.102. Perpustakaan Rekza Pustaka Mangkunegaran.

<sup>104</sup> Pramoedya Ananta, 1999, *Kronik Revolusi I*, Jakarta: Gramedia, hal. 86.



antara radikalisme massa dengan KNIDS dimana peningkatan militansi rakyat mempercepat pengakuan keabsahan KNIDS.

Meluasnya kepemilikan senjata terutama pada anggota gerakan politik dan meningkatnya hasrat nasionalisme menyebabkan banyak terjadinya tindakan politik yang bersifat kekerasan. Perpaduan antara rasa nasionalisme dan kekerasan yang merupakan tradisi militer menjadi ideologi baru bagi gerakan politik di Surakarta dan hal ini terbukti menjadi andalan bagi KNIDS dan sekutu-sekutunya untuk menampilkan diri sebagai pihak yang berdaulat.. Pencapaian tujuan dengan kekerasan merupakan satu-satunya cara dalam mencapai tujuan mereka. Hal ini dikarenakan lemahnya kontrol baik dari negara maupun masyarakat dalam memandang penanganan dampak psikologis masa pendudukan Jepang.<sup>105</sup>

Militansi para pendukung republik pada mulanya bertujuan positif dengan pengibaran-pengibaran bendera dan perebutan fasilitas umum yang strategis. Perebutan kantor-kantor pemerintahan sipil Jepang tidak menimbulkan insiden yang memakan korban dan mempercepat pelaksanaan revolusi itu sendiri. Aksi-aksi tersebut dilakukan di Kantor Jawatan Pos dan Telepon, Jawatan Perminyakan, Jawatan Percetakan, Jawatan angkutan Bermotor, Jawatan Radio, dinas Kepolisian, Dinas Rahasia dan Reserse, dan Dinas Penjara yang dilakukan oleh para anggota Markas Delapan, Barisan Pelopor, Indonesia Muda serta para pegawai Indonesia yang bekerja di tempat tersebut dimana perebutan-perebutan

---

<sup>105</sup> Julianto Ibrahim, 2004, *Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan. Kriminalitas dan Kekerasan Masa Revolusi di Surakarta*, Wonogiri: Bina Citra Pustaka, hal. 46.

tersebut pada akhirnya menjadi fasilitas publik pemerintah RI yang berada di bawah kewenangan KNIDS.<sup>106</sup>

Keengganan Koti Zimu Kyoku Tyokan (pemerintah sipil masa Jepang) menentang semangat revolusi di Surakarta pun terlihat ketika peristiwa perebutan kekuasaan dan parade kemenangan antara AMI dan KNIDS Klaten segera disusul di Surakarta dengan penyerahan pemerintahan sipil Jepang dari tangan Watanabe ke tangan KNIDS. Akan tetapi pada kejadian ini dukungan gerakan pendukung republik di Surakarta telah memasuki babak baru dalam aktivitasnya yaitu keterlibatan mereka dengan kekuasaan.

Walaupun demikian hal ini belum terlihat mencolok karena upaya pengusiran tentara dan perebutan senjata Jepang masih merupakan tujuan utama. Keberhasilan yang didukung barisan perjuangan dalam menekan tentara Jepang membuahkan hasil ketika pada 5 Oktober 1945 mereka mampu menguasai senjata dan tentara Jepang (Butai) di bawah pimpinan T Masse setelah diadakan penculikan terhadap pimpinan tentara Jepang tersebut, walaupun pada mulanya Masse akan menyerahkan senjatanya kepada Pembesar Pemerintah Bangsa Indonesia Daerah Soerakarta (Sumodiningrat sebagai ketua KNIDS).<sup>107</sup>

Dengan kepergian tentara Jepang kini tugas yang tersisa dalam penguasaan wilayah di Surakarta ialah melucuti Kenpetai Surakarta yang berada di bawah pimpinan Kapten Sato. Penolakan Kapten Sato terhadap perlucutan senjata mereka di Surakarta menyebabkan terjadinya pertempuran yang terjadi pada tanggal 12-13 Oktober 1945. Pertempuran ini diakhiri dengan kemenangan pihak

---

<sup>106</sup> Karkono Kamajaya, *op.cit.*, hal. 4-6.

<sup>107</sup> Karkono Kamajaya, *op.cit.*, hal.9.

pemuda dan setelah itu terjadilah perlucutan senjata milik Kenpetai oleh pemuda kemudian menyusul pemindahan anggota Kenpetai ke Tampir, Boyolali.<sup>108</sup>

Keberhasilan mengusir seluruh kekuatan tempur Jepang di Surakarta menyebabkan meningkatnya popularitas KNIDS yang didukung oleh badan perjuangan. Hal ini pula yang memperlemah posisi kerajaan, karena kerajaan tidak pernah terlibat dalam pertempuran pengambilalihan kekuasaan Jepang bahkan Sunan Paku Buwono XII berniat untuk mengambalalih komando para laskar maupun badan perjuangan. Distribusi persenjataan Jepang yang relatif lengkap diatur oleh KNIDS sehingga persenjataan itu pada akhirnya jatuh ke tangan barisan perjuangan dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh KNIDS.<sup>109</sup>

Keberhasilan Badan Perjuangan dan KNIDS dalam mengusir dan merebut senjata dari tentara Jepang dilanjuti oleh kesiapan para pejuang untuk sekutu yang dianggap sebagai perpanjangan tangan dari kolonialisme di Indonesia. Pertempuran-pertempuran yang terjadi antara laskar Indonesia dengan tentara Sekutu di Semarang dan khususnya di Surabaya menyebabkan meningkatnya semangat juang pemuda di Surakarta

Propaganda kemerdekaan yang diserukan oleh Radio Surakarta pada pertempuran-pertempuran tersebut menempatkan Surakarta dalam kedudukan yang penting bagi perjuangan kemerdekaan dan hal inilah yang mengakibatkan Sekutu menilai potensi Surakarta yang berbahaya bagi kepentingannya sehingga Surakarta mengalami pengeboman oleh Sekutu.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> Djawatan Penerangan Kota Besar Surakarta, *op.cit.*, hal.3-4.

<sup>109</sup> Karkono Kamajaya, *op.cit.*, hal.16.

<sup>110</sup> Pramoedya Ananta Toer, *op.cit.*, hal.133-134, 144.

Berakhirnya pertempuran Surabaya mengharuskan para pasukan yang berasal dari Surakarta kembali ke tempat asalnya. Kekalahan pahit dari Sekutu menumbuhkan kengerian para pejuang dalam memandang kekuatan Sekutu. Ketakutan terhadap kembalinya NICA yang tergabung dalam pasukan Sekutu melipatgandakan rasa nasionalisme para pejuang. Sikap anti Belanda yang fanatik dan kurangnya pemenuhan kebutuhan hidup menjadikan mereka akan mudah terombang-ambing yang terjebak dalam kelihaihan para politisi.<sup>111</sup>

### **E. Konflik Politik Republik di Surakarta**

Persaingan politik Republik telah dimulai semenjak proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Pembentukan sistem pemerintah republik yang merupakan buah dari pendudukan fasis Jepang menyebabkan beberapa pihak khawatir atas legitimasi republik. Pertentangan politik di antara tokoh republik tersebut semakin meningkat ketika pada bulan November 1945, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengeluarkan Manifesto Politik Republik dan Maklumat Wapres No. X yang mendukung proses negosiasi dengan pemerintah Belanda di bawah NICA dan diberlakukannya sistem parlementer yang menempatkan Syahrir sebagai Perdana Menteri.<sup>112</sup>

Dibukanya perundingan antara pemerintah RI dan NICA menyebabkan ketidakpuasan dari para pemuda yang lebih menginginkan agar dilakukan perjuangan dengan peperangan terbuka yang dianggap sebagai kesucian

---

<sup>111</sup> J..J. Van de Velde, 1987, *Surat-surat dari Sumatra 1928-1949*. Terjemahan: Pustaka Azet, Jakarta: Pustaka Azet, hal. 142.

<sup>112</sup> Ben Anderson, *op.cit.*, hal. 201.

perjuangan.<sup>113</sup> Ketidakpuasan ini semakin bertambah dalam dengan kepemimpinan Syahrir yang moderat dan hujatannya terhadap segala bentuk pewarisan ala Jepang sehingga menumbuhkan dendam kepada setiap politisi Republik yang pada masa Pendudukan berkolaborasi dengan pemerintah pendudukan.

Persaingan politik yang telah dimulai sejak awal berdirinya RI kian menjadi akibat rasa frustrasi dalam menuntut kedaulatan RI. Perpindahan ibukota RI ke Yogyakarta semakin meningkatkan persaingan kekuasaan untuk saling mengatur proses kedaulatan dan pemerintahan RI. Pertentangan politik antara tokoh RI ini menciptakan pengelompokan kekuatan politik di dalamnya yaitu antara PM Sutan Syahrir, Presiden Sukarno dan Tan Malaka dari Persatuan Perjuangan (PP).<sup>114</sup>

Keruwetan masalah politik ini semakin mendalam ketika secara resmi pemerintah memindahkan ibukota ke Yogyakarta akibat kenyataan pahit dari dikuasainya kota Jakarta oleh Sekutu.<sup>115</sup> Perpindahan pusat kekuasaan republik ke Yogyakarta menyebabkan berpindahnya pula pusat-pusat pergerakan dan tokoh politik ke Yogyakarta baik yang mendukung pemerintah maupun yang mengambil sikap oposisi terhadap pemerintah. Dapat dilihat bahwa persaingan yang telah menjadi tradisi antara Yogyakarta dan Surakarta digunakan dalam konteks politik

---

<sup>113</sup> Dr. A. H. Nasution, *Sekitar Perang Proklamasi Jilid 3*, Bandung: Angkasa, hal. 47.

<sup>114</sup> Rudolf Mrazek, 1996, *Sjahrir, Politik dan Pengasingan di Indonesia*. Terjemahan: Mochtar Pabottinggi, Matheus Nalle, S. Maimoen, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal.. 556.

<sup>115</sup> Nasution, *op.cit.*, hal. 73.

modern. Apabila Yogyakarta menjadi pusat kekuasaan pemerintah maka Surakarta menempati kedudukan sebagai pusat oposisi.

Penggunaan kota Surakarta sebagai basis perjuangan oposisi ternyata sangat sesuai dengan kondisi politik lokal yang mencerminkan kekeruhan dan persaingan politik antara pihak kerajaan dan politisi di Surakarta dimana kedua pihak yang bertikai di Surakarta segera melebur dan berkompromi dengan salah satu kekuatan politik republik untuk saling menjatuhkan satu dengan lainnya yaitu kerajaan dengan pemerintahan Syahrir dan KNIDS serta badan perjuangan yang bekerjasama dengan pihak oposisi.

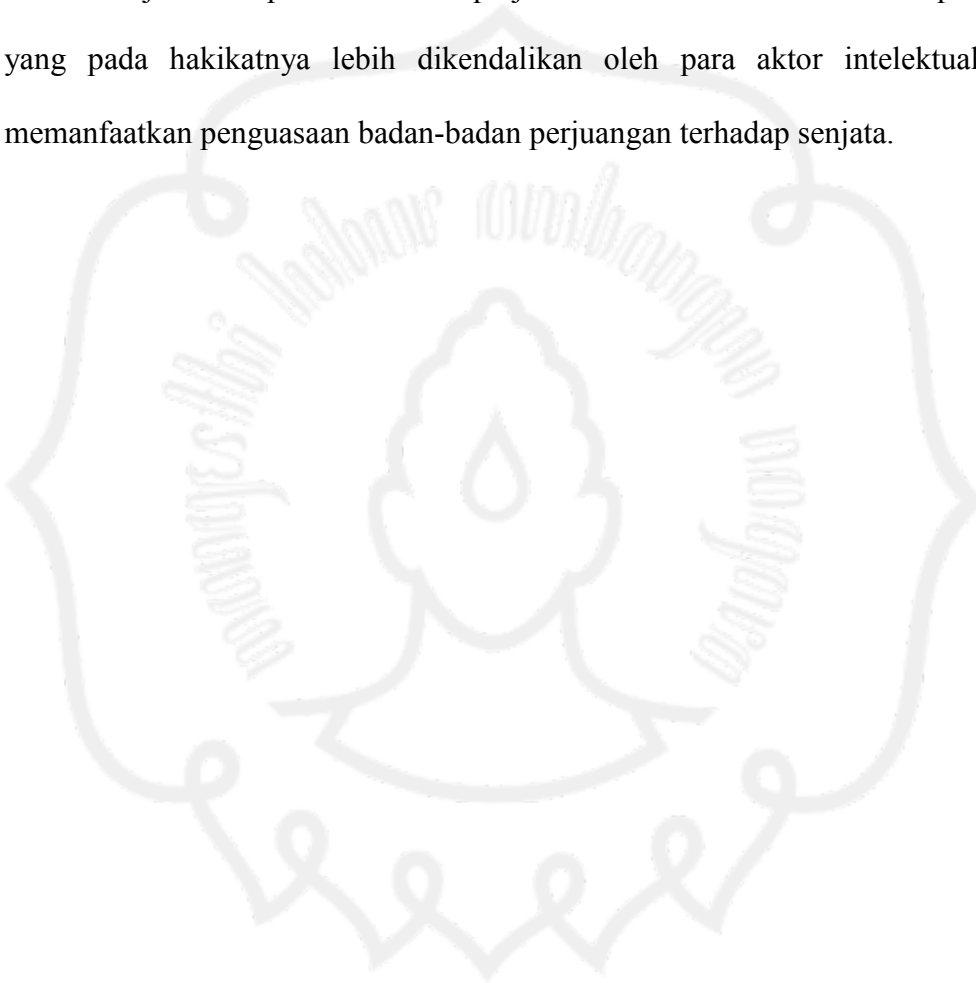
Konflik politik di tingkat lokal maupun nasional ini semakin rumit ketika konflik yang terjadi merambat ke masalah pribadi. Pertentangan pribadi antara Tan Malaka dan Sukarno serta Sukarno dan Sutan Syahrir tidak sejalan dengan pertentangannya dalam kelompok politik pada tiap-tiap individu. Masing-masing pihak kemudian saling melindungi diri dalam pertahanan lokal antara Yogyakarta dan Surakarta. Keberhasilan Sultan untuk menyediakan tempat bagi ibukota RI menjadikan Yogyakarta sebagai tempat yang harus dijaga stabilitas serta status quo politiknya dan bertahan dari gejolak revolusi.<sup>116</sup>

Hal ini sangat berbeda di Surakarta yang merupakan markas para oposisi yang radikal dalam memandang perundingan terhadap Belanda. Menyempitnya wilayah kekuasaan RI menyebabkan posisi Surakarta kian strategis dimana kedudukan Surakarta dianggap sebagai daerah penyangga RI dan pusat mobilisasi

---

<sup>116</sup> Selain masalah pertahanan dalam kedaulatan republik, Sultan pun mendapatkan imbas dari penghargaan yang semestinya terhadap Sukarno yang memiliki kesamaan dalam pola pikir orang Jawa yang diwakili oleh Sultan. Rudolf Mrazek, *op.cit.*, hal. 556.

oposisi dan pemuda.<sup>117</sup> Kondisi ini seiring dengan menurunnya popularitas kerajaan mengingat pertentangannya dengan kelompok anti swapraja dalam memperebutkan kekuasaan. Lemahnya posisi politik kerajaan berbeda dengan barisan perjuangan dimana pada akhirnya kelompok Anti Swapraja akan bersatu untuk menjatuhkan pemerintah swapraja dan terlibat dalam konflik kepentingan yang pada hakikatnya lebih dikendalikan oleh para aktor intelektual yang memanfaatkan penguasaan badan-badan perjuangan terhadap senjata.



---

<sup>117</sup> Suhartono W. Pranoto, *op.cit.*, hal. 165.